



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERAMPASAN ASET  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEMAKSIMALKAN  
PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA**

**TESIS**

**BENY KRISTANTO**

**2110622019**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**2023**



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERAMPASAN ASET  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEMAKSIMALKAN  
PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum**

**BENY KRISTANTO**

**2110622019**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**2023**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Beny Kristanto  
NIM : 2110622019  
Tanggal : 13 Juli 2023

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 13 Juli 2023

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '2000', and 'METERAI TEMPEL'. A unique alphanumeric code 'E3DAAAKX589860029' is printed at the bottom of the stamp.

Beny Kristanto

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Beny Kristanto  
NIM : 2110622019  
Program Studi : Magister Hukum

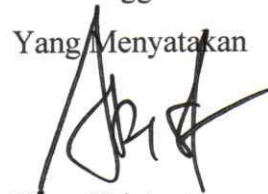
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERAMPASAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEMAKSIMALKAN PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA” .

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/menformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 Juli 2023

Yang Menyatakan



Beny Kristanto



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021-7656971, Fax. 021-7656904  
Website: <http://www.upnvj.ac.id>, Email: [upnvj@upnvj.ac.id](mailto:upnvj@upnvj.ac.id)

---

TESIS

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERAMPASAN ASET  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEMAKSIMALKAN  
PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA

BENY KRISTANTO

2110622019

Telah disetujui untuk Ujian Tesis

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.  
NIP. 19580712 198303 1001

Jakarta, Juni 2023  
Mengesahkan,

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr. Adm. Kes.  
NIP. 19930428 202203 1009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021-7656971, Fax. 021-7656904  
Website: <http://www.upnvj.ac.id>, Email: [upnvj@upnvj.ac.id](mailto:upnvj@upnvj.ac.id)

**PENGESAHAN**

Tesis diajukan oleh :

Nama : Beny Kristanto  
NIM : 2110622019  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Tesis : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  
PERAMPASAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI UNTUK MEMAKSIMALKAN  
PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji serta telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Magister pada program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jakarta

Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LL.M  
Ketua Penguji

Dr. Slamet Tri Wahyudi, SH.,MH  
Penguji Utama

Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH  
Penguji Kedua, Pembimbing



Dr. Suherman, SH., LL.M  
Dekan

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar,  
S.H., M.H., M. Tr. Adm. Kes  
Kaprodi

Ditetapkan : Di Jakarta  
Tanggal Ujian : 13 Juli 2023

# **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERAMPASAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEMAKSIMALKAN PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA**

**BENY KRISTANTO**

## **ABSTRAK**

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara, perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menunjukkan pemberantasan korupsi di Indonesia belum berjalan secara optimal. Selain penanganan tindak pidana korupsi yang belum optimal pemulihan kerugian negara juga belum bisa optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tulisan ini ingin melihat bagaimana kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset di setiap tahap penanganan tindak pidana korupsi dapat memaksimalkan pemulihan keuangan negara saat ini dan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset di setiap tahap penanganan tindak pidana korupsi dapat memaksimalkan pemulihan keuangan negara dimasa yang akan datang. Perampasan aset didalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini masih menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan sehingga perampasan aset masih berdasarkan kesalahan terdakwa (*conviction based asset forfeiture*) dan proses perampasan aset mengikuti proses penegakan hukum tindak pidana korupsi sehingga untuk memaksimalkan pemulihan keuangan negara dituntut peran aktif aparat penegak hukum setiap tahap penanganan tindak pidana korupsi, dimasa yang akan datang selain perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*conviction based asset forfeiture*) diperlukan perampasan aset tanpa pemidanaaan (*non conviction based asset forfeiture*) untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan perampasan aset terpidana korupsi berdasarkan kesalahan seperti apabila pelaku tindak pidana korupsi melarikan diri sehingga dapat memaksimalkan upaya pengembalian kerugian negara akibat korupsi.

Kata Kunci : kebijakan hukum pidana, tindak pidana korupsi, perampasan aset

# **CRIMINAL LAW POLICIES IN ASSET RECOVERY IN CORRUPTION CRIME TO MAXIMIZE STATE FINANCIAL RECOVERY**

**BENY KRISTANTO**

## **ABSTRAK**

Corruption in Indonesia continues to show an increase from year to year, both in terms of the number of cases that occur and the amount of state financial losses, the acts of corruption committed are also increasingly systematic with a scope that enters all aspects of people's lives. The decline in the Indonesian Corruption Perceptions Index shows that the eradication of corruption in Indonesia has not been running optimally. In addition to the handling of criminal acts of corruption that have not been optimal, recovery of state losses has also not been optimal. This study uses a normative juridical approach. This paper wants to see how criminal law policies in asset recovery at every stage of handling corruption can maximize state financial recovery at this time and how the criminal law policy in asset recovery at every stage of handling corruption can maximize state financial recovery in the future. Recovery of assets in eradicating criminal acts of corruption currently still places asset confiscation as an additional crime so that asset confiscation is still based on the defendant's guilt (conviction based asset forfeiture) and the process of confiscating assets follows the process of upholding criminal acts of corruption so as to maximize the recovery of state finances, the active role of law enforcement officials is required at every stage of handling criminal acts of corruption, in the future, in addition to confiscating assets based on the guilt of the accused (conviction based asset forfeiture), it is necessary to confiscate assets without conviction (non conviction based asset forfeiture) for overcoming obstacles to the implementation of asset confiscation of convicted corruption convicts based on mistakes such as when the perpetrators of corruption run away so as to maximize efforts to recover state losses due to corruption.

Keyword : criminal law policies, corruption, asset recovery



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan tesis dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERAMPASAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEMAKSIMALKAN PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA. Tesis ini disusun sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran ( UPN Veteran ) Jakarta.

Pada kesempatan kali ini penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan moril dan materiil sehingga rancangan tesis ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bpk. Dr. Anter Venus,MA. Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran ( UPN Veteran ) Jakarta;
2. Dr. Suherman,SH,LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran ( UPN Veteran ) Jakarta;
3. Bpk Dr. Beniharmoni Harefa SH, LLM selaku Kaprodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran ( UPN Veteran ) Jakarta sampai bulan Juni 2023;
4. Bpk Dr.Handar Subhandi Bakhtiar,S.H.,M.H.,M.Tr.Adm.Kes selaku Kaprodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran ( UPN Veteran ) Jakarta;
5. Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH ., MH selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, semangat dan motivasi;
6. Bpk dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran ( UPN Veteran ) Jakarta.
7. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran ( UPN Veteran ) Jakarta;

8. Keluarga tercinta ibu, istri dan anak anak yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat dalam menyusun tesis ini,
9. Teman teman seperjuangan Magister Hukum tahun 2021 Universitas Pembangunan Nasiolan Veteran ( UPN Veteran ) Jakarta.

Kami menyadari tesis ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis berharap saran , kritik demi kesempurnaan dan perbaikan sehigga tesis dapat memberi manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lebih lanjut. Akhir kata penulis berharap kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, aparat penegak hukum dan pemerintah serta masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamu'alaikum wr . wb

Jakarta, 13 Juli 2023

Beny Kristanto

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Pernyataan Orisinalitas .....	ii
Pernyataan Persetujuan Publikasi .....	iii
Persetujuan Ujian Tesis .....	iv
Pengesahan .....	v
Abstrak .....	vi
Abstract .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar isi .....	x
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN .....	1
I.1. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
I.2. PERUMUSAN MASALAH .....	7
I.3. TUJUAN PENELITIAN .....	8
I.4. MANFAAT PENELITIAN .....	8
I.5. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL .....	8
I.6. METODE PENELITIAN .....	16
I.7. SISTEMATIKA PENULISAN .....	18
<b>BAB II</b> TINJAUAN PUSTAKA .....	20
II.1. TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA .....	20
II.1.1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana atau Politik Hukum Pidana .....	20
II.1.2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana .....	22
II.2. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI .....	23
II.2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	23
II.2.2. Jenis Jenis Tindak Pidana Korupsi .....	27
II.2.3. Kerugian Negera dalam Tindak Pidana Korupsi ..	31
II.3. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI .....	33
II.3.1. Pengertian Penegakan Hukum .....	33
II.3.2. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi .....	36
II.4. TINJAUAN UMUM TERHADAP PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI .....	44
II.4.1. Pengertian Pidana .....	44
II.4.2. Bentuk Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	51
II.4.3. Perampasan Aset atau Barang Sebagai Bentuk Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	54
<b>BAB III</b> METODE PENELITIAN .....	58
III.1. TIPE PENELITIAN .....	58
III.2. SIFAT PENELITIAN .....	59
III.3. SUMBER PENELITIAN .....	60

	III.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	61
	III.5. TEKNIK ANALISA DATA .....	62
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	66
	IV.1 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERAMPASAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEMAKSIMALKAN PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA SAAT INI .....	65
	IV.1.1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi .....	65
	IV.1.2. Kebijakan Hukum Pidana dalam Perampasan Aset atau Barang berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	71
	IV.1.3. Kebijakan Hukum Pidana dalam Perampasan Aset atau Barang berdasarkan UU No 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	74
	IV.1.4. Kebijakan Hukum Pidana dalam Perampasan Aset atau Barang berdasarkan UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	76
	IV.1.5. Kebijakan Hukum Pidana dalam Perampasan Aset atau Barang berdasarkan UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum (KUHP Baru) .....	77
	IV.1.6. Kebijakan Hukum Pidana dalam Perampasan Aset atau Barang berdasarkan RUU Perampasan Asset Tindak Pidana .....	78
	IV.1.7. Perampasan Aset atau Barang dalam tindak pidana korupsi Jiwasaraya An. Heru Hidayat .....	80
	IV.2. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERAMPASAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEMAKSIMALKAN PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA DIMASA YANG AKAN DATANG .....	94
	IV.2.1. Perampasan aset menurut teori keadilan, teori penegakan hukum dan teori Pidanaaan .....	94
	IV.2.2. Perampasan Aset yang efektif untuk memaksimalkan pemulihan keuangan .....	101
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN .....	106
	V.1. KESIMPULAN .....	106
	V.2. SARAN .....	107

## DAFTAR PUSTAKA